

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN
DI JALAN AHMAD YANI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA**

MEDAN

TESIS

FIKA NADYA RAMBE

NPM: 231801016



PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN
DI JALAN AHMAD YANI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh
FIKA NADYA RAMBE
NPM. 231801016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PARKIR
BERLANGGANAN DI JALAN AHMAD YANI OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Nama : Fika Nadya Rambe

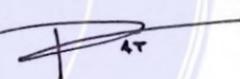
NPM : 231801016

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nina Salmaniah Siregar, M.Si


Dr. Rudi salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

DIREKTUR


Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K,MS

Telah diuji pada 25 maret 2025

Nama : Fika Nadya Rambe
Npm : 231801016

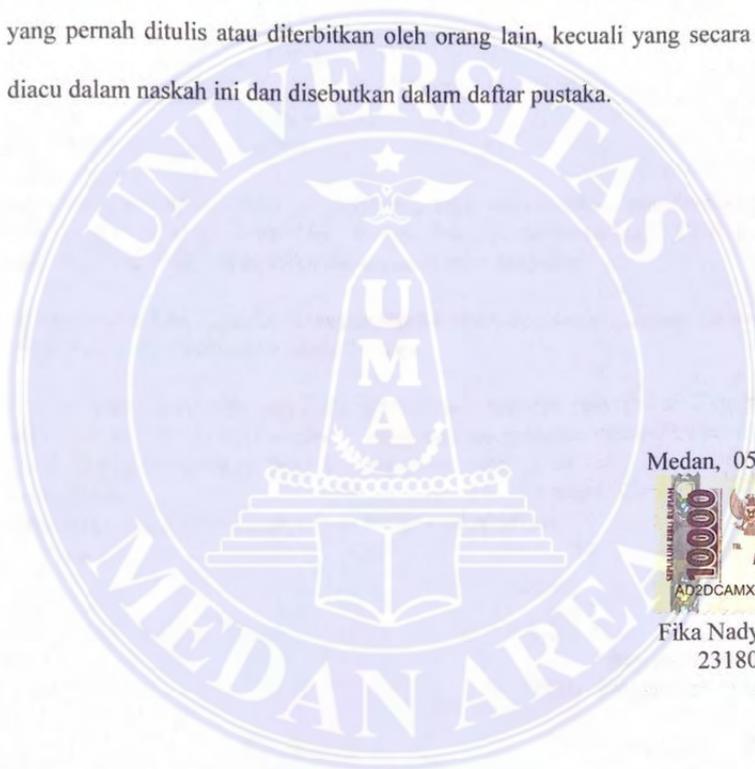


Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Sekretaris : Dr. Chairika Nasution, S.SAP, MAP
Pembimbing I : Dr. Nina Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Rudi salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Adam, MAP

PERNYATAAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 05 Mei 2025



Fika Nadya Rambe
231801016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fika Nadya Rambe
NPM : 231801016
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

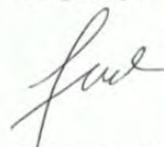
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan di Jalan Ahmad Yani
oleh Dinas Perhubungan Kota Medan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), menerbitkan, dan memperbanyak tugasakhir/skripsi/tesissaya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 05 Mei 2025

Yang menyatakan



Fika Nadya Rambe

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN

DI JALAH AHMAD YANI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA

MEDAN

Nama : Fika Nadya Rambe
NPM : 231801016
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina salmaniah Srg, M.Si
Pembimbing II : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Kota Medan menghadapi permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks, terutama di kawasan strategis seperti Jalan Ahmad Yani. Salah satu penyebab utama adalah parkir liar yang tidak tertata, mengakibatkan kemacetan dan penurunan efisiensi jalan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perhubungan Kota Medan menerapkan kebijakan parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 26 Tahun 2024, dengan tujuan menertibkan parkir, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengurangi parkir liar.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut menggunakan model George C. Edwards III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak positif terhadap ketertiban lalu lintas dan peningkatan PAD. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, resistensi dari masyarakat dan juru parkir, serta koordinasi birokrasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, modernisasi infrastruktur parkir, pengawasan lebih ketat, serta koordinasi antarinstansi yang lebih baik agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Parkir Berlangganan, Kota Medan

ABSTRAC

The Implementation of the Subscription-Based Parking Policy on Ahmad Yani Street by the Medan City Department of Transportation.

Name : Fika Nadya Rambe
NPM : 231801016
Study Program : Magister Administrasi Publik
1 Supervisor : Dr. Nina salmaniah Srg, M.Si
2 Supervisor : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Medan City faces increasingly complex traffic problems, especially in strategic areas such as Jalan Ahmad Yani. One of the main causes is unregulated illegal parking, which leads to congestion and inefficient road use. To address this issue, the Medan City Transportation Agency implemented a subscription-based parking policy under Mayor Regulation No. 26 of 2024, aiming to organize parking, increase local revenue (PAD), and reduce illegal parking.

This study evaluates the implementation of the policy using George C. Edwards III's model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative method was used, employing interviews, observations, and document analysis.

The findings indicate that the policy has positively impacted traffic order and revenue generation. However, several challenges remain, such as inadequate public awareness, limited infrastructure, resistance from the community and parking attendants, and suboptimal bureaucratic coordination. Therefore, this study recommends enhancing public outreach, modernizing parking infrastructure, strengthening enforcement, and improving inter-agency coordination to ensure more effective policy implementation.

Keywords: *Policy Implementation, Subscription Parking, Medan City*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Shubhanallah wa ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam yang telah memberikan segala nikmat dan karunia yang berlimpah kepada peneliti. sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan program parkir berlangganan di jalan Ahmad Yani oleh Dinas Perhubungan Kota Medan”**, ini merupakan salah satu persyaratan dalam menempuh ujian Magister (Strata 2), jurusan Administrasi Publik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. Selama penyusunan tesis ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah saya Alm. Drs. Syahrul Efendi Rambe, S.Sos, M.AP dan Ibu saya Dewi Sartika
2. Kedua kakak tercinta saya Febrina Sari Rambe, Fany Yustika Rambe dan Adik saya Habib Ansyari Rambe
3. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area
4. Ibu Prof. Dr. Ir Retna Astuti K, MS selaku Direktur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.I.Pol selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Kaprodi Magister Administrasi Publik
8. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si selaku dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, petunjuk,

- nasihat, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sarannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan baik
9. Bapak Dr.Rudi Salam Sinaga S.Sos, M.si selaku dosen Pembimbing 2 yang telah bnyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, petunjuk, nasihat, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sarannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan baik
 10. Bapak/Ibu Dosen PascaSarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi kuliah kepada penulis
 11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan
 12. Bapak Haris Sugraka selaku Kepala seksi wilayah 1 kota medan yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian
 13. Seluruh narasumber yang terlibat dalam tesis ini yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian
 14. Kepada sahabat saya dari SD shefira, wanda , susan yang telah menamani dan menyemangati dalam proses pembuatan tesis
 15. Seluruh teman-teman spesial penulis Meutia,Salsa Lidya, Farhan beserta teman-teman Magister Administrasi Publik Stambuk 2023 yang turut serta dalam proses pembuatan penelitian ini baik berupa dukungan, semangat sepanjang periode perkuliahan yang sangat menyenangkan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dari penjelasan tesis dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan berguna bagi setiap orang dan semua pihak yang membacanya serta mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT

Medan, 2025
Penulis

Fika Nadya Rambe

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRAC.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelian Terdahulu	5
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	10
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.4.1 Model Van Meter dan Van Horn Donald	16
2.4.2 Model Mazmanian dan Sabatier.....	18
2.4.3 Model Hogwood dan Gunn.....	19
2.4.4 Model Merilee S. Grindle.....	21
2.4.5 Model Edward.....	25
2.5. Parkir Berlangganan.....	28
2.6. Dasar Hukum Perpajakan Di Kota Medan.....	29
2.7. Kerangka Berpikir.....	30
2.8. Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian.....	35

3.3. Informan Penelitian	36
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5. Metode Analisis data.....	46
3.6. Definisi Konsep	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1. Gambaran Umum Kota Medan	51
4.1.2. Visi dan Misi Kota Medan.....	54
4.1.3. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Medan	56
4.2. Obsevasi.....	64
4.2.1. Proses pendaftaran Program Parkir berlangganan di Kota Medan	64
4.2.2. Penggunaan Sticker Parkir Berlangganan.....	67
4.2.3. Tantangan yang di hadapi	67
4.2.4. Rekomendasi/Masukan.....	68
4.3. Penyajian Data	68
4.3.1. Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan di Jalan Ahmad Yani Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan	68
4.3.2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan di Jalan Ahmad Yani Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.....	100
BAB V PENUTUP	104
5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia dari segala sektor mendorong penduduknya untuk memiliki tingkat mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi dilihat sebagai usaha untuk menunjang percepatan pembangunan mulai dari perorangan hingga tingkatan industri. Peran alat transportasi sangat dibutuhkan untuk bisa mempercepat jalannya mobilitas tinggi dimana transportasi bisa disediakan oleh pemerintah dan juga bisa dimiliki secara pribadi.

Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, mengalami perkembangan yang pesat dalam sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Salah satu dampak utama dari perkembangan ini adalah peningkatan signifikan jumlah kendaraan bermotor, baik pribadi maupun umum. Jalan-jalan di pusat kota, termasuk Jalan Ahmad Yani, mengalami lonjakan volume lalu lintas, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan transportasi, seperti kemacetan, kurangnya lahan parkir, dan penggunaan jalan yang tidak teratur.

Jalan Ahmad Yani merupakan salah satu jalur strategis di Kota Medan yang menghubungkan berbagai kawasan penting seperti pusat bisnis, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Sebagai jalur utama, Jalan Ahmad Yani berperan vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Namun, pesatnya pertumbuhan kendaraan di jalur ini menimbulkan permasalahan baru, terutama terkait kemacetan yang sering terjadi di jam-jam sibuk. Selain itu, tingginya angka parkir liar dan penggunaan lahan yang tidak teratur turut memperparah situasi di kawasan tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan meluncurkan sebuah kebijakan inovatif, yakni program berlangganan parkir di Jalan Ahmad Yani. Program ini dirancang untuk memberikan solusi terhadap isu parkir sembarangan yang menghambat kelancaran lalu lintas dan mengoptimalkan pengelolaan lahan parkir di kawasan tersebut. Melalui program berlangganan, pengguna kendaraan dapat membayar biaya parkir dengan sistem yang lebih teratur, di mana lahan parkir akan dikelola secara profesional oleh pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan arus lalu lintas akan lebih tertib, dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik. Kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi parkir liar, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga memberikan keyakinan, keamanan dan kenyamanan. Kebijakan ini diinisiasi oleh Dinas perhubungan kota Medan, dengan dukungan regulasi dalam bentuk

Peraturan Daerah (Perda) No.1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum (Prokopim Pemko Medan, 2024). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah parkir dan lalu lintas, tetapi juga berpotensi memberikan pemasukan tambahan bagi pemerintah daerah melalui pendapatan dari retribusi parkir. Namun, meskipun program ini memiliki tujuan yang jelas, implementasinya di lapangan masih perlu dievaluasi secara mendalam. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, disosialisasikan, dan diterima oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada “implementasi kebijakan program berlangganan di Jalan Ahmad Yani oleh Dinas Perhubungan Kota Medan” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang lebih efektif, tidak hanya di Jalan Ahmad Yani, tetapi juga di kawasan-kawasan strategis lainnya di Kota Medan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah agar diketahui arah jalan suatu penelitian maka, di dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan program parkir parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani oleh Dinas perhubungan Kota Medan
2. Apa saja faktor-faktor pendukung & penghambat Dinas Perhubungan Kota Medan dalam implemmentasi kebijakan parkir berlangganan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan program parkir parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani oleh Dinas perhubungan Kota Medan

2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung & penghambat Dinas Perhubungan Kota Medan dalam implelementasi kebijakan parkir berlangganan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan yang telah di rumuskan diatas, maka penelitian ini di harapkan akan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya pada ilmu administrasi negara dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi instansi terkait mengenai implementasi kebijakan penerapan parkir berlanggan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami implementasi kebijakan parkir berlangganan di berbagai daerah di Indonesia, beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik ini dengan mendalam. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan parkir berlangganan serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan parkir. Berikut adalah beberapa penelitian terkait yang relevan:

1. Implementasi Kebijakan Sistem Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo memungkinkan pengguna untuk membayar retribusi parkir bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan. Dengan sistem ini, pengguna mendapatkan akses ke 279 titik parkir yang ditentukan, serta keuntungan tambahan seperti asuransi kehilangan dan kesempatan untuk mengikuti undian hadiah. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal komunikasi antar pihak terkait, sumber daya manusia, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung kelancaran program ini. Hal ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor internal dalam

organisasi pemerintahan yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Persamaan:

- Kedua penelitian membahas kebijakan parkir berlangganan sebagai metode untuk mengatur dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir.
- Baik penelitian ini maupun penelitian di Kota Medan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir dengan memudahkan pembayaran parkir, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta menertibkan parkir liar.
- Keduanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi.

Perbedaan:

- Lokasi penelitian berbeda, dengan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian di Kota Medan fokus pada Jalan Ahmad Yani.
- Penelitian di Sidoarjo mencakup sistem parkir berlangganan yang mengintegrasikan pembayaran dengan pajak kendaraan, sementara penelitian di Medan berfokus pada kawasan tertentu (Jalan Ahmad Yani), yang dapat memiliki dinamika yang berbeda terkait pengelolaan parkir.
- Penelitian di Sidoarjo lebih menekankan pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang perlu perbaikan, sementara di Kota Medan mungkin lebih banyak membahas penerapan sistem digital dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo

Penelitian ini fokus pada analisis implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020 tentang kebijakan parkir berlangganan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari *George C. Edwards III*, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kota Probolinggo telah sesuai dengan teori tersebut. Kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena komunikasi yang baik antar pihak terkait, adanya sumber daya yang memadai, serta disposisi pelaksana yang mendukung. Namun, meskipun kebijakan ini berjalan sesuai harapan, beberapa tantangan terkait peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan perlu diperhatikan lebih lanjut untuk menjaga keberlanjutan program ini.

Persamaan:

- Kedua penelitian mengkaji bagaimana kebijakan parkir berlangganan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Fokus penelitian di Probolinggo dan di Kota Medan adalah pada penggunaan kebijakan parkir untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan retribusi daerah.
- Menggunakan teori implementasi kebijakan *George C. Edwards III* yang

mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Perbedaan:

- Penelitian di Probolinggo lebih menyoroti penerapan kebijakan parkir berlangganan secara umum dan pada tingkat kota, sementara penelitian di Medan lebih terfokus pada implementasi kebijakan di wilayah spesifik, yaitu di Jalan Ahmad Yani.
- Penelitian di Probolinggo lebih menekankan pada peran kebijakan dalam meningkatkan PAD, sedangkan di Medan kemungkinan lebih mengarah pada efisiensi pengelolaan parkir dan penertiban parkir liar.
- Tinjauan aspek komunikasi dan disposisi di Probolinggo lebih mendalam, sedangkan di Medan, penelitian bisa jadi lebih fokus pada aplikasi teknologi parkir digital (E-Parking) di area tertentu.

3. Implementasi Kebijakan Parkir Digital dalam Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Medan

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan parkir digital (E-Parking) di Kota Medan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan optimasi pendapatan retribusi daerah. Sistem parkir digital bertujuan untuk menertibkan parkir liar, meningkatkan kenyamanan pengendara, dan meminimalisir praktik parkir ilegal yang merugikan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Parking di Kota Medan telah berhasil menertibkan parkir liar, meningkatkan efisiensi dalam sistem parkir, serta meningkatkan kenyamanan pengendara. Selain itu, kebijakan ini juga berhasil

meningkatkan pendapatan retribusi daerah secara signifikan. Keberhasilan implementasi E-Parking ini menegaskan pentingnya teknologi dalam mendukung pengelolaan parkir yang lebih efektif dan efisien, serta memperlihatkan peran penting pemerintah dalam mengadaptasi teknologi untuk kepentingan masyarakat.

Persamaan:

- Baik penelitian ini maupun penelitian tentang kebijakan parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani di Kota Medan berfokus pada peningkatan efisiensi pengelolaan parkir dan optimalisasi retribusi daerah.
- Keduanya mengkaji bagaimana teknologi dan sistem baru dapat mendukung pengelolaan parkir yang lebih baik, meskipun fokus teknologinya berbeda (digital versus berlangganan).
- Penelitian ini, seperti penelitian di Medan, menekankan pada penertiban parkir liar dan pengelolaan parkir yang lebih teratur.

Perbedaan:

- Penelitian ini berfokus pada kebijakan parkir digital (E-Parking) yang diterapkan di Kota Medan secara keseluruhan, sementara penelitian di Jalan Ahmad Yani di Medan berfokus pada area tertentu dan mungkin lebih spesifik membahas kebijakan parkir berlangganan.
- Teknologi yang diterapkan di Kota Medan melalui penelitian ini lebih berfokus pada digitalisasi dan penggunaan sistem E-Parking, sementara kebijakan parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani mungkin lebih mengutamakan integrasi pembayaran parkir dengan pajak kendaraan.
- Penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem digital untuk

meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna, sementara penelitian kebijakan parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani lebih berfokus pada keberlanjutan program melalui kebijakan langganan.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun masing-masing daerah menghadapi tantangan dan kondisi yang berbeda, kebijakan parkir berlangganan dan digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana kebijakan, dan dukungan struktur birokrasi yang solid.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu Public Policy. Dimana banyak sekali para ahli yang memberikan pendapat mereka mengenai pengertian kebijakan publik. Menurut Thomas Dye (1992) dalam (Sahya, 2014) Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dimana alasan kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Hal itu memberikan gambaran bahwa kebijakan publik itu diberikan untuk memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Kebijakan menurut E.Anderson dalam (Islamy, 2001), *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of*

concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan (Wahab, 2001), menyatakan mengenai batasan kebijakan publik yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Wahab, 2012), Kalau orang melihat konsep implementasi itu dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk- bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Dengan demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan, sesudah diberlakukannya undang-undangan atau ketentuan perundangan. Dalam realita, mengingat kompleksnya persoalan yang muncul, tentu saja pemahaman kita tentang makna implementasi kebijakan tidaklah sedemikian formal, linier, kaku, dan normatif seperti itu. Dilihat dari arti luas, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergisasi yang digerakan untuk

bekerjasama guna menetapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti itu tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Hal ini berarti tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan. Secara sederhana, situasi implementasi mungkin dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kereta kencana berpenumpang yang ditari oleh empat ekor kuda yang warna kulitnya beragam: hitam, putih, coklat, dan abu-abu. Seorang sains kereta yang piawai tentu saja harus memahami karakter individual dan perilaku masing-masing kuda. Ia harus mampu menciptakan kerja sama sedemikian rupa dengan keempat ekor kuda tersebut. Penyikapan kognitif ini dimaksudkan agar keserempakan tempo berlari kuda-kuda (yang berbeda karakter) itu tetap terkontrol, dan yang terpenting kereta tidak terguling (Wahab, 2012) Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (Wahab, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Meter dan Hornn juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tindakan tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Grindle (1980:7) dalam (Andani 2019)

menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980:7) dalam (Andani 2019) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Wahab, 2012) mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan dari pemerintah setempat dalam peningkatan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan fasilitas parkir. Kebijakan tersebut dibuat untuk menertibkan masyarakat dan cenderung bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah di dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan di sini merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang terkadang berbentuk undang-undang, perintah-perintah, ataupun keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan peradilan yang mengidentifikasi sebuah masalah yang harus segera diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengatur berbagai cara untuk mengimplementasikannya Sutomo, I., Siti, N., Siregar, S., & Hartono, B (2023)

2.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam (Wahab, 2012), yaitu :

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f) Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Sunggono, 1994) , implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- k) Isi kebijakan Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- l) Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para

pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

m) Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

n) Pembagian potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas

2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan publik dalam retribusi parkir di Lamongan, maka peneliti mengumpulkan teori tentang model-model implementasi kebijakan publik yang akan dijadikan acuan peneliti dalam menentukan model implementasi apa yang telah diterapkan di Kabupaten Lamongan. Model-model tersebut antara lain:

2.4.1 Model Van Meter dan Van Horn Donald

Van Meter dan Carl Van Horn, beliau bersandar pada karya Pressman

dan Wildavsky, namun diberi sentuhan progressif menjadi sebuah model proses implementasi. Pendekatan- pendekatan sebelumnya meski dianggap sangat membantu memahami proses implementasi, namun sangat kurang dalam 25 kerangka teoritik. Dalam mengembangkan kerangka teoritis, mereka didasarkan pada 1) teori organisasi, 2) studi tentang dampak kebijakan publik dan 3) berbagai studi hubungan antar-pemerintah.

Van Meter dan Van Horn memulai analisisnya dengan pertimbangan kebutuhan untuk mengklasifikasi kebijakan untuk memberi solusi pada kesulitan yang terjadi dalam ranah implementasi. Implementasi, hemat mereka, akan sukses ketika sedikit perubahan diperlukan dan tujuan konsensus tinggi. Berkaca pada ragam kasus, secara pragmatis kebijakan dengan perubahan yang terjadi secara incremental justru biasanya akan mendapat banyak dukungan, oleh karenanya jika menginginkan kebijakan terimplementasikan dengan baik, maka sebaiknya dengan perubahan marginal yang terjadi secara incremental. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik sebagai berikut: 1) *policy standards and objectives* (standar yang jelas dan tujuan kebijakan); 2) *the resources and incentives made available* (sumber-sumber kebijakan); 3) *the quality of interorganizational relationships* (kualitas hubungan interorganisasional); 4) *the characteristics of the implementation agencies* (karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana); 5) *the economic, social and political environment* (lingkungan politik, sosial, dan ekonomi); dan 6) *the*

'disposition' or 'response' of the implementers (disposisi atau tanggapan atau sikap para pelaksana), yang mana satu sama lain proses saling berkelindan dan menjadi rangkaian tahapan sistemis yang dilakukan secara longitudinal (Sahya, 2014)

2.4.2 Model Mazmanian dan Sabatier

Nugroho (Nugroho, 2006), Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (a framework for implementation analysis). Mazmanian- Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel Independen Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel Intervening Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis

konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependen Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2.4.3 Model Hogwood dan Gunn

(Abdul Wahab, 2001) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu yakni:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi. Pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.

Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber- sumber tersebut harus dapat disediakan.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
8. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program.
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan

bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika kebijakan dapat dilaksanakan dengan memebuhi syarat-syarat dan kriteria diatas maka kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan sempurna dan hasilnya akan sesuai target yang diinginkan dan dapat mensejahterakan masyarakat.

2.4.4 Model Merilee S. Grindle

Model selanjutnya adalah Model Implementasi Kebijakan oleh Merilee S.Grindle. Menurut Merilee S. Grindle dalam (Sahya, 2014) mengatakan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan public tergantung pada variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), serta tingkat keberhasilannya bergantung pada tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan. Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Pendekatan Meriee S.Grindle dikenal dengan *Implementation as A*

Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:

a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

1) Dampak

2) Tingkat perubahan yang terjadi

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

a) Isi Kebijakan (*Content of Policy*), mencakup :

1) Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi). Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa

pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- 2) *Type of Benefits* (Tipe Manfaat). Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- 3) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai). Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
- 4) *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- 5) Program Implementer (Pelaksana Program). Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah

harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

6) *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

b) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*),

mencakup :

1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan- Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

2) *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana). Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam (Sahya, 2014)

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.4.5 Model Edward

George C. Edwards III dalam (Abidin, 2002) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack to attention to implementation. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu

- a) Komunikasi (*Communication*) Komunikasi serta koordinasi

merupakan elemen yang ikut memegang peranan penting didalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Semakin kuat komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam proses pengimplementasian kebijakan maka semakin kecil pula kemungkinan akan timbulnya kesalahankesalahan dari pelaksanaannya dilapangan.

- b) Sumber daya (*resources*) Keberhasilan maupun kegagalan pengimplementasian sebuah kebijakan ikut ditentukan oleh faktor sumber daya. Sumber daya disini yang dimaksudkan adalah ketersediaan akan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama serta sumber daya penunjang yaitu ketersediaan sumber daya anggaran. Sedangkan Subarsono (Subarsono, 2005) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya nonmanusia.
- c) *disposition* (Kesediaan dan komitmen) Sikap menerima atau menolak dari para agen pelaksana akan kebijakan yang diimplementasikan ikut mempengaruhi atau berperan didalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan. hal ini dimungkinkan agar pelaksanaan dari kebijakan yang telah disepakati mampu mengatasi persoalan dan masalah yang terjadi. disposisi implementor memiliki 3 hal penting didalamnya, yakni respond implementor terhadap kebijakan, kognisisi atau pemahaman terhadap kebijakan, dan prefensi nilai yang dimiliki oleh

implementor didalam pengimplementasian kebijakan.

d) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structures*) Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operational procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung model implementasi yang dipaparkan oleh para ahli diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap teori tentu memiliki keunggulan tersendiri dari teori lainnya. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya pilihan model yang terbaik. Yang perlu diingat bahwa kita tentu harus memilih model yang sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri, hal ini dimaksudkan agar apapun model yang digunakan dapat berjalan secara efektif dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Adapun didalam penelitian ini, maka penulis lebih memilih Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang menguraikan kajian tentang Komunikasi organisasi dalam aktivitas implementasi, Sumber daya pendukung (resources) dalam mendukung berjalannya implemetasi sebuah kebijakan,

Disposisi yakni Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan, serta Struktur birokrasi yang dibentuk didalam mengimplemetasikan kebijakan 33 yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan menurut penulis, elemen-elemen yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dianggap lebih relevan dan secara spesifik mampu mengupas fenomena dilapangan terkait dengan judul penelitian yaitu Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu bentuk dari model Edward III menurut penulis lebih sederhana sehingga akan sangat mudah dipahami penggunaannya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2.5. Parkir Berlangganan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Prokopim Pemko Medan, 2024) merupakan upaya untuk memberikan pelayanan perparkiran yang semakin berkualitas dengan tarif lebih terjangkau. Selain itu, imbuhnya, pembayaran retribusi hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Di sisi lain, program ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencegah kemungkinan terjadinya

kebocoran dan pungutan liar dalam retribusi daerah dari sektor parkir. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Parkir berlangganan dianggap sebagai terobasan yang optimal karena dibayar satu kali dalam satu tahun sehingga tarif yang dikeluarkan akan sesuai dengan yang telah ditentukan.

2.6. Dasar Hukum Perpajakan Di Kota Medan

Dasar hukum perpajakan yang berlaku saat ini di kota Medan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
- e) Keputusan Mendagri RI Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah.
- f) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 ayat 7 Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- g) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan

h) Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Wali Kota Medan No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan telah resmi memberlakukan sistem parkir berlangganan di seluruh wilayah Kota Medan. Sejak Awal bulan juli 2024 sudah tidak dibenarkan lagi melakukan pengutipan parkir apapun bentuknya, manual maupun edc, itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang berlaku hanya parkir berlangganan.

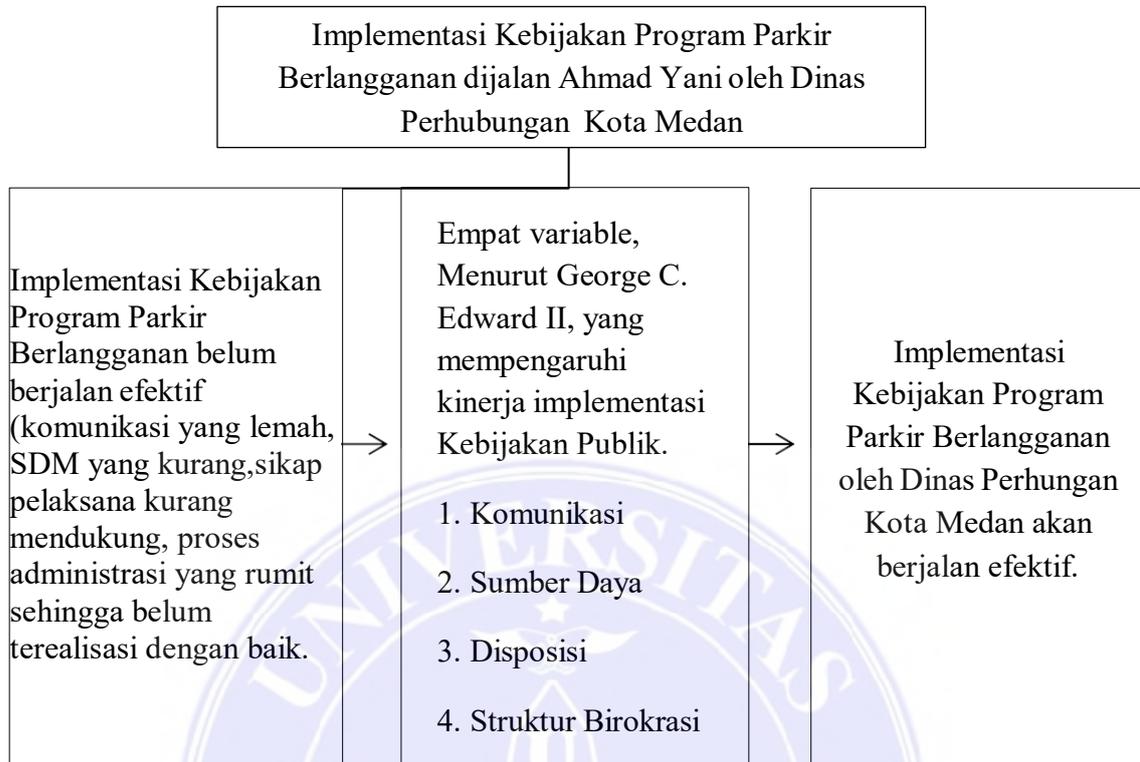
2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan teori-teori yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan pedoman atau landasan di dalam suatu pola pemikiran untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam sebuah penelitian. Kerangka berfikir bertujuan memberikan alur pikir bagi peneliti diharapkan memberikan jalan proses pemikiran penelitian sehingga mampu mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya Implementasi Kebijakan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat capaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi strategis instansi pemerintah yang menghasilkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (R Fachrozi, Rudi Sinaga 2021) Oleh karena itu, dalam penelitian ini, untuk menganalisis permasalahan guna terwujudnya keberhasilan implementasi kebijakan Parkir

Berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan , peneliti menggunakan model Implementasi yang dikemukakan oleh George C.Edward III ada empat variable yang mempengaruhi kinerja implementasi publik :

1. Komunikasi: Bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada pihak yang terlibat (pelaksana dan masyarakat). Dalam konteks parkir berlangganan, ini bisa mencakup seberapa jelas informasi mengenai program tersebut disampaikan kepada pengguna parkir.
2. Sumber daya: Apakah sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur, cukup untuk mendukung implementasi. Misalnya, apakah ada infrastruktur parkir yang memadai untuk mengakomodasi skema berlangganan?
3. Disposisi atau sikap pelaksana: Bagaimana sikap atau komitmen dari pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, seperti dinas perhubungan atau pengelola parkir.
4. Struktur birokrasi: Seberapa baik struktur organisasi atau sistem yang mendukung implementasi kebijakan tersebut. Misalnya, apakah ada aturan yang jelas mengenai penerapan dan pemantauan program parkir berlangganan?



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Gambar tersebut menjelaskan alur implementasi kebijakan program parkir berlangganan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan Ahmad Yani. Pada tahap awal, kebijakan ini belum berjalan secara efektif, sehingga tujuan yang diharapkan belum terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaannya.

Untuk memahami dan memperbaiki implementasi tersebut, digunakan kerangka analisis dari George C. Edward III, yang menyebutkan bahwa efektivitas kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi.

Jika keempat faktor ini dapat dikelola dan ditingkatkan, maka implementasi

kebijakan parkir berlangganan akan berjalan lebih baik. Kesimpulan dari alur ini adalah bahwa dengan memperbaiki faktor-faktor pendukung tersebut, program parkir berlangganan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya, yaitu menciptakan ketertiban dan optimalisasi retribusi parkir di Kota Medan.

2.8. Fokus Penelitian

Berpedoman dari masalah penelitian yang ada, maka terdapat batasan dalam melakukan penelitian ini. Hal ini sangat diperlukan dalam membantu proses pelaksanaan penelitian sehingga peneliti akan lebih terarah dan memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Penetapan fokus penelitian ini didasarkan atas beberapa aspek yang ada di dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang dirasa peneliti cocok terhadap permasalahan yang ada di lapangan dan juga beberapa fokus ditentukan oleh

1. peneliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan, adapun fokus penelitiannya sebagai berikut: Implementasi kebijakan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

- a) Sumber daya

- Sumberdaya Manusia sebagai sumberdaya utama dalam melaksanakan program parkir berlangganan.
- Sumberdaya anggaran sebagai sumberdaya penunjang pelaksanaan program parkir berlangganan.

- b) Disposisi

- Komitmen pelaksanaan kebijakan aparatur Dinas Perhubungan Kota Medan dan tenaga Kontrak (Juru parkir) di Kota Medan
- Komitmen Masyarakat sebagai penerima kebijakan.

c) Komunikasi

- Hubungan komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan , swasta atau penyedia jasa petugas parkir dan masyarakat.
- Program komunikasi melalui media cetak & elektronik, serta media sosialisasi.

d) Struktur Birokrasi

- Mekanisme Kebijakan (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan
- Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan c) Mekanisme koordinasi antara para implementator

2. Faktor pendukung dan penghambat Implemetasi Kebijakan Program parkir berlangganan Kota Medan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif menghendaki suatu informan dalam bentuk deksripsi dan lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan di Kota Medan. Menurut (Moleong, 2010) pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial. pemberian suara pada perasaandan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai November, Sesuai dengan waktu dan tempat penelitian yang telah ditentukan, penelitian dilakukan di Kantor Dinas perhubungan Kota Medan di jalan Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127 dan juga di jalan Jend.

Ahmad Yani No, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara
20212

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan sangat penting karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada informan yang dipilih. Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau kriteria khusus dalam memilih informan agar data yang didapatkan relevan dan mendalam. Informan sebaiknya memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang sesuai dengan topik atau fenomena yang diteliti. Misalnya, dalam penelitian tentang Program parkir berlangganan, informan yang dipilih bisa meliputi masyarakat pengguna, juru parkir, serta staf yang terlibat langsung dalam program tersebut. Informan yang memiliki pengalaman langsung dengan isu yang diteliti akan memberikan wawasan yang lebih mendalam. Keahlian atau pengalaman mereka sangat penting untuk memperoleh informasi yang valid. Informan yang terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti cenderung memiliki informasi yang lebih relevan. Informan yang mampu memberikan jawaban yang mendalam dan terperinci sangat diutamakan dalam penelitian kualitatif, karena wawancara atau diskusi mendalam merupakan cara utama untuk menggali informasi secara menyeluruh.

Untuk melengkapi data dan informasi dari narasumber, peneliti ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Informan kunci yaitu Kepala wilayah 1 Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan di jalan Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 2012. Seksi Parkir Wilayah I dipimpin oleh

Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah I. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I;
- Penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah I;
- Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur

lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Informan utama yaitu Juru parkir Kota Medan di jalan Ahmad Yani No, Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara 2012. Tugas juru parkir dalam program parkir berlangganan memiliki beberapa peran penting yang berkaitan dengan pengelolaan parkir dan pelayanan kepada pengguna parkir. Berikut adalah beberapa tugas utama juru parkir dalam program tersebut:

- Juru parkir bertanggung jawab untuk memastikan area parkir terkelola dengan baik, aman, dan rapi. Mereka memantau apakah kendaraan parkir sesuai dengan aturan yang berlaku dalam program parkir berlangganan, seperti tempat parkir yang telah ditentukan untuk pelanggan berlangganan.
- Juru parkir memeriksa stiker parkir berlangganan yang dipasang pada kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan yang diparkir memiliki hak untuk parkir di area tersebut. Mereka memastikan bahwa hanya kendaraan yang terdaftar dengan stiker yang valid yang boleh parkir di lokasi khusus.

- Juru parkir memberikan informasi kepada pengguna parkir, baik yang berlangganan maupun yang tidak, mengenai lokasi parkir yang tersedia dan aturan program parkir berlangganan. Mereka juga membantu pengendara dalam mencari tempat parkir yang sesuai dengan kebijakan yang ada.
 - Jika ada kendaraan yang parkir tanpa stiker berlangganan atau parkir di area yang salah, juru parkir bertugas untuk memberikan peringatan atau menindaklanjuti dengan prosedur yang berlaku, seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang atau melakukan penindakan sesuai dengan kebijakan setempat.
 - Juru parkir mencatat jumlah kendaraan yang parkir, termasuk kendaraan dengan stiker berlangganan. Mereka mungkin juga bertanggung jawab untuk membuat laporan terkait penggunaan area parkir, jumlah kendaraan yang parkir, dan masalah lain yang muncul di lapangan.
 - Selain itu, juru parkir juga memastikan bahwa area parkir tetap aman dan terhindar dari gangguan atau kerusakan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna parkir. Mereka menjaga agar tidak terjadi parkir liar atau penyalahgunaan tempat parkir.
- c. Informan tambahan yaitu Masyarakat yang merupakan pengguna jasa atas inovasi pelayanan yang diberikan Dishub. Tugas masyarakat sebagai pengguna stiker parkir berlangganan adalah:
- Mematuhi Ketentuan Penggunaan: Menggunakan stiker parkir sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari penyedia layanan

parkir.

- Menempelkan Stiker dengan Benar: Stiker harus ditempelkan di tempat yang mudah terlihat pada kendaraan agar dapat diperiksa oleh petugas parkir.
- Menjaga Stiker Tetap dalam Kondisi Baik: Masyarakat bertanggung jawab menjaga stiker agar tidak rusak atau hilang selama masa berlakunya.
- Membayar Retribusi Tepat Waktu: Mengurus dan membayar biaya berlangganan sesuai dengan jadwal dan tarif yang ditentukan.
- Mengikuti Aturan Parkir: Masyarakat harus tetap mematuhi peraturan parkir yang berlaku, seperti parkir di tempat yang diperbolehkan dan tidak mengganggu lalu lintas.
- Menunjukkan Stiker atau Bukti Berlangganan: Jika diminta oleh petugas, pengguna wajib menunjukkan stiker parkir berlangganan sebagai bukti keabsahan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Pendekatan ini mengacu pada Silverman (2020) dalam *Qualitative Research*, yang menekankan pentingnya observasi langsung dalam memahami fenomena

sosial secara objektif. Teknik observasi ini dilakukan untuk memantau secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terkait dengan implementasi kebijakan program parkir di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Melalui observasi, penulis dapat mengamati langsung kejadian-kejadian yang terjadi, mengetahui individu-individu yang terlibat, waktu kejadian, serta respon yang diberikan oleh berbagai pihak terkait, baik itu pelaksana kebijakan maupun masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan agar dapat memperoleh data yang valid dan akurat tentang proses implementasi kebijakan tersebut (Burhan Ashshofa, 2001)

Untuk itu, penulis mengunjungi beberapa lokasi terkait dengan kebijakan parkir ini, termasuk kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, yang menjadi instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir, serta melakukan pengamatan langsung di Jalan Ahmad Yani, yang menjadi fokus kebijakan. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil pengamatan lapangan yang dilakukan di lokasi-lokasi tersebut, serta wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat.

Di antaranya adalah Kepala Seksi Wilayah 1 Dinas Perhubungan Kota Medan, juru parkir yang bekerja di kawasan tersebut, serta pengguna parkir berlangganan yang menjadi bagian dari masyarakat yang terkena dampak kebijakan ini. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan kebijakan parkir, serta untuk memahami berbagai dinamika yang terjadi di lapangan

terkait dengan kebijakan tersebut, seperti tantangan yang dihadapi, respon masyarakat, dan efektivitas implementasi kebijakan parkir di kawasan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan (Burhan Ashshofa, 2001) Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara ini dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam Program Parkir berlangganan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani. Metode ini mengacu pada Creswell & Poth (2018) dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design*, yang menjelaskan bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman individu secara detail.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan program parkir di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan, yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pengamatan langsung di lapangan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan perspektif, pengalaman, dan pemahaman dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai beberapa hal penting yang terkait dengan kebijakan parkir, antara lain:

- Tujuan dan sasaran kebijakan parkir: Apa tujuan utama dari kebijakan parkir yang diterapkan di Jalan Ahmad Yani? Bagaimana kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mendukung pendapatan daerah?
- Proses implementasi kebijakan: Bagaimana kebijakan parkir diterapkan di lapangan?

Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

- Pengawasan dan evaluasi: Bagaimana sistem pengawasan dilakukan terhadap kebijakan parkir ini? Apakah ada evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap efektivitas kebijakan?
- Peran dan tugas masing-masing pihak: Apa peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kebijakan parkir, seperti pemerintah, pengelola parkir, dan masyarakat?
- Respon masyarakat: Bagaimana masyarakat, terutama pengguna parkir, merespons kebijakan parkir ini? Apakah ada keluhan atau kendala yang mereka alami terkait dengan implementasi kebijakan ini?

Wawancara ini dilakukan kepada berbagai pihak yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan yang relevan tentang kebijakan parkir di Jalan Ahmad Yani. Beberapa responden yang diwawancarai meliputi:

- Kepala Seksi Wilayah 1 Dinas Perhubungan Kota Medan: Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan kebijakan parkir, wawancara dengan Kepala Seksi ini bertujuan untuk

memahami aspek kebijakan, tujuan, serta strategi implementasi parkir di kawasan tersebut. Informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran tentang peran pemerintah dalam mengelola parkir dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

- Juru Parkir di Kota Medan: Juru parkir adalah pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Wawancara dengan juru parkir bertujuan untuk mengetahui pengalaman mereka dalam mengelola parkir.
- Pengguna Parkir Berlangganan: Pengguna parkir berlangganan adalah pihak yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan parkir ini. Wawancara dengan pengguna parkir berlangganan bertujuan untuk mengetahui pendapat mereka tentang kebijakan parkir, apakah mereka merasa kebijakan ini memberikan kemudahan atau justru menimbulkan kesulitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan penelitian. Pendekatan ini didukung oleh Bryman (2021) dalam *Social Research Methods*, yang menyatakan bahwa dokumen resmi dapat menjadi sumber data yang valid dalam penelitian sosial. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian (Beni Ahmad Saebani, 2008). Dan juga dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya - karya

monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar. Misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain – lain (Sugiyono, 2016). Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara:

1) Menentukan Tujuan Wawancara

Tentukan tujuan wawancara untuk menggali informasi tentang kebijakan parkir, tantangan implementasi, dan respon masyarakat.

2) Menentukan Responden

Wawancara dilakukan kepada:

- Kepala Seksi Wilayah 1 Dinas Perhubungan Kota Medan: Untuk memahami kebijakan, tujuan, dan tantangan implementasi.
- Juru Parkir: Untuk mengetahui tantangan operasional dan interaksi dengan pengguna parkir.
- Pengguna Parkir Berlangganan: Untuk mengetahui respon mereka terhadap kebijakan parkir.

3) Menyusun Pertanyaan

Buat pertanyaan yang relevan, seperti tujuan kebijakan, kendala implementasi, dan pengalaman di lapangan, sesuai dengan peran masing-masing responden.

4) Mengatur Jadwal dan Tempat

Atur waktu dan tempat wawancara yang nyaman untuk kedua belah

pihak.

5) Melakukan Wawancara

Lakukan wawancara dengan jelas dan terbuka, pastikan semua pertanyaan dijawab dengan detail. Gunakan alat rekam dengan izin responden.

6) Mencatat dan Mengorganisir Hasil

Catat atau transkrip hasil wawancara untuk memudahkan analisis.

7) Analisis Hasil Wawancara

Analisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, dan saran perbaikan kebijakan parkir.

8) Melaporkan Temuan

Susun laporan temuan wawancara sebagai bagian dari kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

3.5. Metode Analisis data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan dalam mengkategorikan serta mengolah data sehingga mudah untuk membuat narasi deskriptif dari fenomena yang diteliti. Analisis data dimulai dengan menyajikan data dan menelaah seluruh data yang tersedia, menyusunnya menjadi satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data dan menganalisis informasi tersebut dengan nalar peneliti hingga membuat kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2016) menjelaskan beberapa langkah dari melakukan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal penting mengenai penelitian dengan melihat tema dan pola hingga memberikan gambaran jelas dan mudah untuk peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Berdasarkan permasalahan implementasi program parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani Kota Medan, beberapa poin penting yang direduksi adalah:

- Kondisi Awal: Kebijakan parkir berlangganan sudah dirancang oleh Dinas Perhubungan Kota Medan tetapi belum terealisasi secara maksimal di lapangan.
- Masalah Utama: Pelaksanaan kebijakan menghadapi kendala seperti komunikasi yang tidak efektif, kurangnya sumber daya (anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja), rendahnya komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang kurang mendukung.
- Hasil Sementara: Program belum berjalan efektif, sehingga parkir liar masih terjadi dan tujuan kebijakan, seperti ketertiban parkir dan peningkatan retribusi, belum tercapai.
- Upaya yang Dilakukan: Sosialisasi kepada masyarakat, penertiban parkir liar, dan evaluasi kebijakan oleh pihak Dishub Medan.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang disusun secara teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya. Peneliti perlu mengkaji reduksi data sebagai dasar pemaknaan. Penyajian data dilakukan dengan memvisualisasikan temuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi di lapangan:

- Lokasi Pelaksanaan: Jalan Ahmad Yani, yang merupakan kawasan padat aktivitas di pusat Kota Medan, dengan banyak kendaraan yang memanfaatkan bahu jalan untuk parkir.
- Kondisi Implementasi:
 - i) Komunikasi: Informasi kebijakan belum sampai secara merata kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitar Jalan Ahmad Yani.
 - ii) Sumber Daya: Fasilitas parkir yang terbatas, jumlah petugas yang minim, serta anggaran yang belum memadai untuk mendukung implementasi.
 - iii) Disposisi: Tidak semua petugas memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan kebijakan akibat rendahnya pengawasan.
 - iv) Struktur Birokrasi: Mekanisme administrasi kebijakan masih panjang dan rumit, sehingga pelaksanaannya lambat.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dikemukakan dari berbagai sumber informasi dan data yang sudah ditarik dan diolah oleh peneliti sebagai bukti-bukti valid dan konsisten dalam penarikan kesimpulan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi terkait implementasi program parkir di Jalan Ahmad Yani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan:

- Menyusun Kesimpulan Awal

Setelah data tentang implementasi program parkir di Jalan Ahmad Yani dikumpulkan dan dianalisis, peneliti mulai menyusun kesimpulan sementara yang mengarah pada jawaban atas pertanyaan

penelitian. Kesimpulan ini mencakup efektivitas kebijakan parkir, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pengelolaan lalu lintas di kawasan tersebut.

- Mengujicoba Temuan

Pada tahap ini, peneliti memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang telah diperoleh. Peneliti akan mengevaluasi apakah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mendukung temuan yang ada dan apakah temuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang relevan.

- Proses Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan yang diperoleh dari lapangan dengan teori atau kebijakan yang ada. Peneliti juga dapat mengumpulkan data tambahan, seperti laporan evaluasi kebijakan atau masukan dari pihak terkait, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid dan akurat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan parkir yang diterapkan di Jalan Ahmad Yani memang berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dapat diterima oleh masyarakat serta instansi terkait.

Proses verifikasi dan penarikan kesimpulan ini akan membantu memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam penelitian benar-benar menggambarkan realitas di lapangan dan memberikan jawaban yang sah atas pertanyaan penelitian terkait implementasi kebijakan parkir di kawasan tersebut.

3.6. Definisi Konsep

Definisi konsep menurut (Singarimbun 2008)adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan teori tersebut, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah proses melaksanakan atau menerapkan suatu rencana, kebijakan, atau program yang telah dirancang sebelumnya
2. Kebijakan adalah seperangkat aturan, keputusan, atau tindakan yang dirancang oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Parkir Berlangganan adalah sistem parkir dimana pengguna membayar biaya tetap (biasanya dalam jangka waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan) untuk mendapatkan izin atau hak memarkir kendaraan di area tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Medan

1. Lokasi Dan Geografi

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Terletak di pesisir timur laut Sumatera, Medan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, menjadikannya sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

- Letak geografis: 3°35'LU 98°40'BT
- Luas wilayah: ±265,10 km²
- Ketinggian: Berkisar antara 2 hingga 37 meter di atas permukaan laut.

2. Sejarah

Medan pada awalnya adalah sebuah perkampungan yang disebut "Medan Putri." Pada abad ke-19, Medan berkembang pesat karena adanya perkebunan tembakau Deli yang terkenal hingga ke Eropa. Kedatangan para pedagang dari berbagai negara, termasuk Tionghoa, India, dan Arab, memperkaya budaya dan komunitas Medan, sehingga menjadi kota multietnis yang beragam seperti sekarang.

3. Demografi

Medan adalah kota yang kaya akan keberagaman budaya,

suku, dan agama. Beberapa etnis utama di Medan meliputi Melayu, Batak, Tionghoa, Jawa, India, dan lainnya. Keragaman ini menciptakan perpaduan tradisi yang unik dalam kehidupan sehari-hari warga Medan.

- Jumlah penduduk: Sekitar 2,5 juta jiwa (2023).
- Etnis utama: Batak, Melayu, Tionghoa, India Tamil, dan Jawa.
- Agama utama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu.

4. Lambang Kota Medan

Menurut situs resmi Kota Medan, lambang dari Kota Medan memiliki arti tersendiri bagi Kota Medan baik dari bentuk, susunan lambang, dan warna-warna yang digunakan dalam lambang tersebut.



Gambar 4.1 Lambang Kota Medan

Sumber : <https://portal.medan.go.id/>

Berikut arti simbol dan elemen yang mencerminkan karakteristik, sejarah, serta nilai-nilai yang dipegang oleh kota ini. Berikut adalah rincian lambang Kota Medan beserta arti dari setiap bagiannya:

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan program parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan, dipengaruhi oleh empat faktor utama:

1. Komunikasi

Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan berbagai sosialisasi, seperti melalui media sosial dan pertemuan langsung. Namun, masih ada masyarakat yang belum memahami manfaat atau cara kerja parkir berlangganan. Sosialisasi ini perlu ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak orang.

2. Sumber Daya

Tenaga kerja dan dukungan swasta sudah tersedia, tetapi kendala utama adalah keterbatasan lahan parkir dan minimnya teknologi, seperti sistem pembayaran digital. Hal ini membuat masyarakat enggan menggunakan sistem parkir berlangganan.

3. Disposisi

Petugas parkir dan staf Dinas Perhubungan sudah berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, sebagian masyarakat masih menolak kebijakan ini karena kurang paham atau terbiasa menggunakan parkir liar.

4. Struktur Birokrasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi dengan instansi lain

sudah ada, tetapi proses birokrasi yang rumit dan pengawasan yang kurang optimal menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

5.2. Saran

Agar program parkir berlangganan lebih efektif, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Komunikasi yang Lebih Baik

- Sosialisasi lebih kreatif, seperti diskusi komunitas atau simulasi di tempat umum.
- Fokus menjelaskan manfaat parkir berlangganan kepada masyarakat yang belum paham, dengan pendekatan yang lebih personal.

2. Optimalisasi Sumber Daya

- Pastikan anggaran cukup untuk mendukung infrastruktur dan pengawasan.
- Penguatan Komitmen Pelaksana

3. Latih petugas parkir agar lebih profesional.

- Libatkan masyarakat dalam evaluasi kebijakan agar mereka merasa ikut berperan.
- Berikan insentif kepada petugas yang bekerja dengan baik.

4. Penyederhanaan Birokrasi

- Permudah proses administrasi, seperti penerbitan stiker parkir berlangganan.
- tingkatkan pengawasan di lapangan dengan melibatkan lebih banyak pihak.

- Perkuat koordinasi antara Dinas Perhubungan, kepolisian, dan swasta agar pelaksanaan lebih efektif.

Dengan upaya ini, program parkir berlangganan dapat mengurangi kemacetan, mengatur parkir lebih tertib, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan lingkungan transportasi yang nyaman bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A, sahya. (2014). *kebijakan publik*. Pustaka setia.
- Abdul Wahab, S. (2001). *Analisis Kebijakan Publik dari formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. (kedua). bumi aksara.
- Abidin, S. Z. (2002). *Kebijakan Publik* (Revisi Cet). Suara Bebas.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Awaeh, O., Pioh, N., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung Dikecamatan Lirung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–13.
- Beni Ahmad Saebani. (2008). *Metode Penelitian*. Pustaka setia.
- Burhan Ashshofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta.
- Bryman, A. (2021). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip kebijakan negara*. bumi aksara.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nina Siti Salmaniah Siregar. (2022). Interaksi Komunikasi Organisasi. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 53–64.
<https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1846>
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik Formulasi, Impleementasi, dan Evaluasi*.

Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Pemko medan. (2017). *Rincian tugas dan fungsi perhubungan kota medan*.

https://jdih.pemkomedan.go.id/img_perundangan/35PERWAL%2520NO%252063%2520TAHUN%25202017%2520TENTANG%2520RINCIAN%2520

[0TAHUN%25202017%2520TENTANG%2520RINCIAN%2520](https://jdih.pemkomedan.go.id/img_perundangan/35PERWAL%2520NO%252063%2520TAHUN%25202017%2520TENTANG%2520RINCIAN%2520)

Prokopim Pemko Medan. (2024). *Parkir Berlangganan Sesuai Perda*

No.1/2024, Bobby Nasution: Tujuannya Berikan Keyakinan,

Keamanan & Kenyamanan. [https://portal.medan.go.id/berita/parkir-](https://portal.medan.go.id/berita/parkir-berlangganan-sesuai-perda-no12024-bobby-nasution-tujuannya-berikan-keyakinan-keamanan-kenyamanan-read4618.html)

[berlangganan-sesuai-perda-no12024-bobby-](https://portal.medan.go.id/berita/parkir-berlangganan-sesuai-perda-no12024-bobby-nasution-tujuannya-berikan-keyakinan-keamanan-kenyamanan-read4618.html)

[nasution-tujuannya-berikan-keyakinan-keamanan-kenyamanan read4618.html](https://portal.medan.go.id/berita/parkir-berlangganan-sesuai-perda-no12024-bobby-nasution-tujuannya-berikan-keyakinan-keamanan-kenyamanan-read4618.html)

R Fachrozi, Rudi Sinaga (2021). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor

23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus

Rapid Transit Pada Dinas Perhubungan Kota Binjai Implementation of Binjai

Mayor Regu. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1),

30–43.

Silverman, D. (2020). *Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.

Singarimbun, Masri, S. E. (n.d.). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*.

pustaka pelajar.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (cet. 23).

Alfabeta.

Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.

Sutomo, I., Siti, N., Siregar, S., & Hartono, B. (2023). *Implementasi Kebijakan*

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik

Baru pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Era Pandemi Covid-19 Policy Implementation of Regent Regulation Number 23 of 2021 Concerning Admi. 5(4), 3022–3038.

<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1693>

Wahab, A. S. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. bumi aksara.



LAMPIRAN

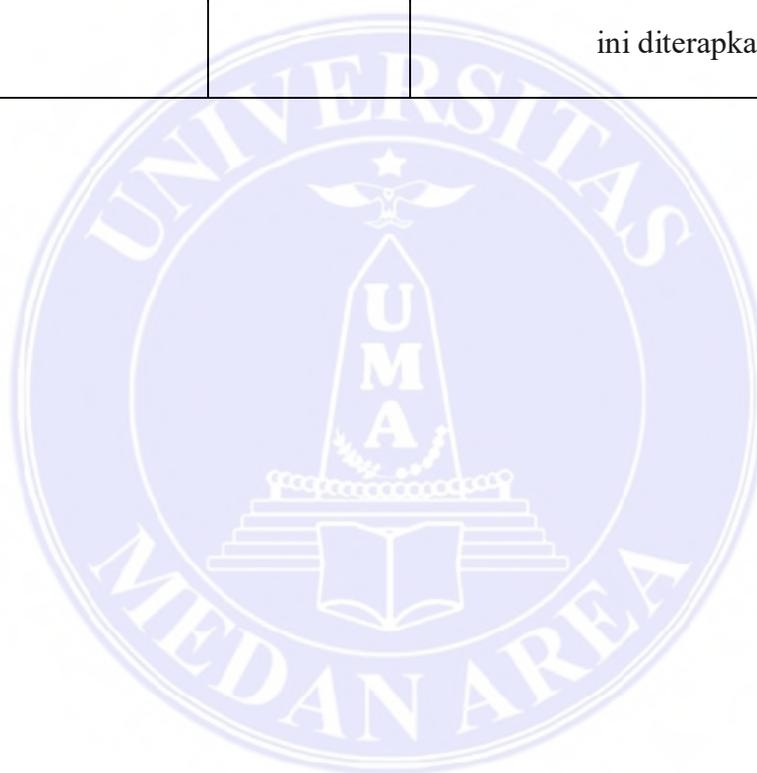
Lampiran 1. Pedoman Hasil Wawancara

INFORMAN KUNCI	ASPEK	PERTANYAAN
Kepala Seksi Wilayah 1 Dinas Perhubungan Kota Medan (18 Oktober 2024; 10.31 WIB)	Komunikasi	Bagaimana cara Dinas Perhubungan menyosialisasikan program parkir berlangganan kepada masyarakat dan juru parkir?
		Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada para pihak yang terlibat?
	Sumber Daya	Apakah sumber daya yang tersedia, seperti anggaran dan tenaga kerja, sudah mencukupi untuk mengimplementasikan program ini?
		Bagaimana kelengkapan fasilitas pendukung (seperti alat pembayaran elektronik atau tanda parkir resmi) di Jalan Ahmad Yani?
	Disposisi	Bagaimana komitmen dan respons dari pihak juru parkir terhadap kebijakan parkir berlangganan?
Apakah ada pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan pemahaman juru parkir terkait kebijakan ini?		

	Struktur Birokrasi	Bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan program parkir berlangganan di lapangan?
		Apakah ada prosedur standar operasional (SOP) yang jelas untuk program ini?
Juru Parkir di Jalan Ahmad Yani (20 Oktober 2024; 14.20 WIB)	Komunikasi	Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang kebijakan parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani?
		Apakah informasi tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi di lapangan?
	Sumber Daya	Apakah Anda merasa fasilitas dan perlengkapan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan mendukung pekerjaan Anda dalam menerapkan kebijakan ini?
		Bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap penghasilan Anda?
	Disposisi	Bagaimana sikap Anda terhadap kebijakan parkir berlangganan ini? Apakah Anda setuju atau memiliki keberatan tertentu?
	Apakah Anda pernah diberi pelatihan atau pengarahan terkait kebijakan ini?	
	Struktur	Apakah ada pengawasan atau evaluasi

	Birokrasi	dari Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini?
		Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan yang cukup dari pihak berwenang untuk mengatasi kendala di lapangan?
Masyarakat (Pengguna Parkir Berlangganan) (20 Oktober 2024; 21.00 WIB)	Komunikasi	Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan parkir berlangganan di Jalan Ahmad Yani? Bagaimana cara Anda mendapatkan informasi tersebut?
		Menurut Anda, apakah informasi tentang program ini sudah cukup jelas?
	Sumber Daya	Bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas parkir di Jalan Ahmad Yani sejak diberlakukannya kebijakan ini?
		Apakah Anda merasa biaya yang dibebankan sesuai dengan kualitas pelayanan parkir?
	Disposisi	Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan parkir berlangganan ini? Apakah Anda merasa kebijakan ini menguntungkan atau justru memberatkan?
		Apakah Anda pernah mengalami kendala

		saat menggunakan layanan parkir berlangganan?
	Struktur Birokrasi	Menurut Anda, bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program ini?
		Apakah Anda merasa ada peningkatan dalam pelayanan parkir setelah kebijakan ini diterapkan?



Lampiran 2. Dokumentasi

No	GAMBAR	INFORMASI KUNCI	LOKASI	TANGGAL
1		Bapak Haris Sugraha	Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan	20 Oktober 2024
2		Bapak Erwin Rangkuti	Jalan Ahmad Yani	20 Oktober 2024
3		Bapak Tono	Jalan Ahmad Yani	22 Oktober 2024

4		Ibu Tiara	Jalan Ahmad Yani	22 Oktober 2024
5		Kak Dhia	Jalan Ahmad Yani	22 Oktober 2024

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian MAP



UNIVERSITAS MEDAN AREA PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994, Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1799/PPS-UMA/WDI/01/X/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

08 Oktober 2024

Yth. Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan

di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Fika Nadya Rambe
N P M : 231801016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan di Jalan Ahmad Yani oleh Dinas Perhubungan Kota Medan

Untuk melaksanakan pengambilan data di kantor dinas perhubungan kota medan sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dir. Bid. Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

CC. File



Kampus Utama : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878 Fax. (061) 7366998 Medan 20223

Lampiran 4. Surat Keterangan Riset



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/2585

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Wakil Direktur Bidang Penjaminan Mutu Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor 1799/PPS-UMA/WDI/01/X/2024 Tanggal 08 Oktober 2024 Perihal Surat Izin Penelitian MAP.

NAMA : Fika Nadya Rambe
NIM : 231801016
JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : "Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan di Jalan Ahmad Yani Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan"
LOKASI : Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA : 2 (dua) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Wakil Direktur Bidang Penjaminan Mutu Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (I/IVb)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Wakil Direktur Bidang Penjaminan Mutu Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area.



Universitas Medan Area
Jalan Pahlawan 14, Medan 20009
Telp. (061) 7873439
Fax. (061) 7873314
Email: info@uma.ac.id
Website: www.uma.ac.id

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : Dishub Perko medan go id
Pos-el : dishub_kota medan_1@gmail.com

Medan, 18 Oktober 2024

Nomor : 00-9/4638
Lampiran : -
Hal : Terima Riset

Yth. Wakil Direktur Bidang Penjaminan
Mutu Akademik Pasca Sarjana
Universitas Medan Area
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Nomor 000.9/2585
Tanggal 15 Oktober 2024 Perihal : Surat Keterangan Riset A n Fika Nadya Rambe : NIM :
231801016 : Jurusan : Ilmu Administrasi Publik Judul : Implementasi Kebijakan Program
Parkir Berlangganan di Jalan Ahmad Yani Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah
diterima melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Dinas Perhubungan,
Sekretaris

Sunono S.S.T, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIK 197302061996021001